

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI BPK PERWAKILAN KALBAR

Selasa, 18 juni 2018 – Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Kalimantan Barat, **Joko Agus Setyono**, memaparkan perkembangan pembangunan Zona Integritas kepada kepada media dan para pegawai di lingkungan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPK Kalbar).

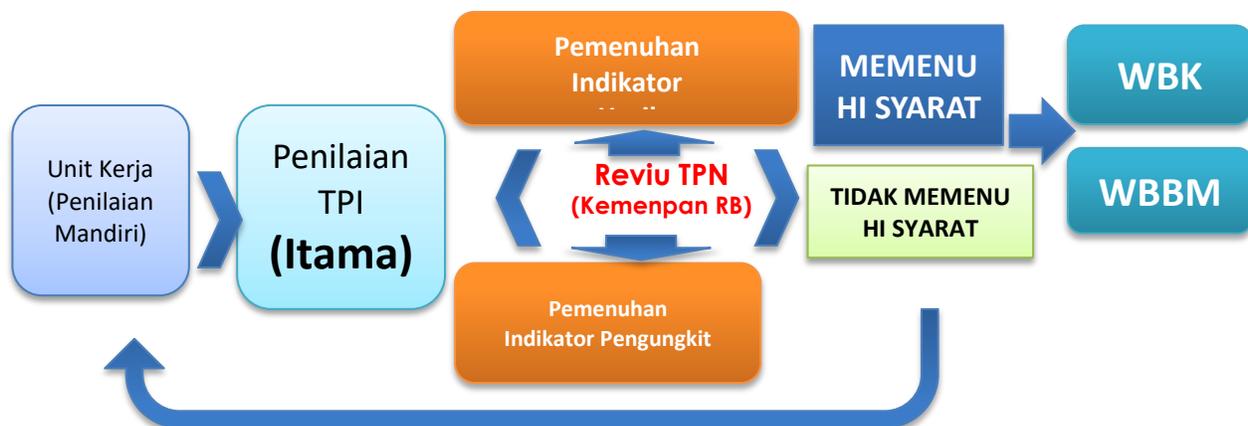
Kalan BPK Kalbar mengawali penjelasannya dengan penguraian singkat mengenai mandat pemeriksaan BPK, antara lain pasal 23 E UUD 1945 dan Undang-Undang Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil pemeriksaan LKPD TA 2018 yang telah dilaksanakan, definisi, mekanisme penilaian ZI dan upaya yang sedang dan telah dilaksanakan BPK



Hasil pemeriksaan atas 14 entitas pemeriksaan di Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang, Kayong Utara, dan Provinsi Kalimantan Barat masih memperoleh Opini WDP. Turunnya opini Provinsi menjadi WDP disebabkan antara lain terjadinya pelampauan anggaran yang material dan usulan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 Provinsi Kalimantan Barat yang tidak disetujui DPRD. Padahal, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

dengan tidak adanya persetujuan DPRD, anggaran yang seharusnya digunakan adalah sesuai perda APBD awal. Ketika BPK membandingkan realisasi dengan anggaran awal, sebelum perubahan, yang telah disetujui DPRD, terjadi pelampauan anggaran kurang lebih Rp600 miliar.

Sebagai organisasi pemeriksa, sebelum menilai entitas, BPK perlu menilai diri sendiri. Salah satu perwujudan upaya perbaikan oleh BPK adalah mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sesuai Peraturan kementerian Penadayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014. WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah dan jajarannya yang memiliki komitmen untuk mewujudkan melalui upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Predikat ini diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.



Mekanisme penilaian dimulai dengan penilaian mandiri oleh unit kerja, kemudian dilakukan penilaian oleh pemeriksa interna BPK yaitu oleh Inspektorat Utama (Itama), untuk selanjutnya dinilai oleh Kemenpan RB (oleh Tim Penilai Nasional/TPN) apakah BPK Kalbar memenuhi syarat dalam memperoleh predikat WBK ataupun WBBM. TPN menilai Indikator Hasil dan Indikator Pengungkit. Indikator Pengungkit hanya dinilai apabila unit kerja memenuhi syarat minimal Indikator hasil.

Indikator Pengungkit mencakup Manajemen Perubahan (15 poin); Penataan Tatalaksana (5 poin); Penataan Manajemen (15 poin); Penguatan Pengawasan (15 poin); Penguatan Akuntabilitas Kinerja (10 poin); dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (10 poin). Sedangkan, indikator hasil mencakup unsur Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (20 poin) dan Peningkatan Pelayanan Publik (20 poin).



Untuk tahun 2019, hasil penilaian mandiri Zona Integritas BPK Kalbar Tahun 2019 atas Indikator Pengungkit dan Indikator Hasil telah mencapai 63,9. Dari Indikator Pengungkit, BPK telah melaksanakan pencanangan pembangunan Zona Integritas, dukungan peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, peningkatan kemudahan akses publik kepada BPK melalui penyediaan ruangan Pusat informasi dan Komunikasi, pemutakhiran dan integrasi database entitas pemeriksaan secara online dalam Portal BPK, penggunaan indikator baru dalam menilai kepuasan auditee (entitas yang diperiksa oleh BPK), pengkomunikasian secara tertulis melalui media cetak buatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang bernama “Kabar Kalbar”, penerapan budaya organisasi, pemberian *reward* dan

punishment kepada pegawai, serta penggunaan aplikasi komputer dalam mengontrol penggunaan obat pada Klinik BPK Kalbar. Sedangkan, nilai atas Indikator Hasil ditentukan melalui pencapaian penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK dan survei kepada para pemangku kepentingan BPK. Survei ini mencakup atas persepsi korupsi dan kualitas pelayanan yang diberikan BPK.

Atas usaha-usaha yang telah dilaksanakan, BPK Kalbar tidak serta merta puas sehingga tidak berinovasi. BPK kalbar justru senantiasa mengupayakan perbaikan. Antara lain dengan mengembangkan aplikasi untuk mempermudah kegiatan pemeriksaan BPK Kalbar melalui aplikasi *Mobile Auditor*. Aplikasi ini dikembangkan oleh pegawai BPK Kalbar, **Benidiktus Triasmoro** dan **Putut Bayu Panuntun**.



Menjawab pertanyaan salah satu wartawan yang hadir, Kalan BPK Kalbar menjelaskan bahwa ini adalah kali kedua BPK Kalbar akan dilakukan penilaian oleh Kemenpan RB. Kesulitan yang dihadapi BPK Kalbar adalah *nature* operasionalitas BPK Kalbar sebagai pemeriksa pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang berbeda dengan penyedia layanan publik lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tidak seperti pelayanan publik yang misalnya diberikan oleh rumah sakit pemerintah, BPK tidak secara langsung

berhubungan dengan masyarakat dalam melaksanakan fungsi utamanya.

Mengakhiri pemaparannya, Kalan BPK Kalbar mengharapkan adanya peningkatan *awareness* pegawai atas pengetahuan dan informasi yang selalu berkembang serta mengaplikasikannya ke dalam pelaksanaan kerja. Tidak kalah penting, pegawai BPK Kalbar juga diharapkan dapat menjaga komunikasi yang baik kepada para *stakeholders* BPK. Komunikasi yang baik dengan *stakeholders* akan menunjang fungsi BPK Kalbar.

